

# Membangun Etika di Media Sosial dengan Menghindari Sapaan Disfemistik

Agus Budi Wahyudi<sup>1</sup>, Joko Santosa<sup>2</sup>, dan Atiqa Sabardila<sup>3\*</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Pendidikan Bahasa Indonesia / Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

<sup>3</sup> Magister Pengkajian Bahasa Pascasarjana

\*Email: [as193@ums.ac.id](mailto:as193@ums.ac.id)

---

## Abstrak

**Keywords:**  
sapaan disfemistik,  
akun, teknik baca  
markah, teknik padan  
referensial, dan etika  
bermedia sosial

Artikel ini mendeskripsikan bentuk sapaan disfemistik yang muncul di akun resmi Jokowi yang diaktifkan tahun 2014. Objek penelitian berupa bentuk sapaan. Adapun datanya berupa kalimat atau kalimat dalam akun resmi Jokowi yang berisi bentuk sapaan yang digunakan untuk menyapa kandidat presiden Joko Widodo dan elite pendukungnya. Sumber data berupa Akun resmi Jokowi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik baca markah dan padan referensial.

Dari hasil analisis disimpulkan bahwa bentuk sapaan disfemistik yang digunakan di akun tersebut berupa kata-kata dari bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Karena penggunaan bentuk disfemistik belum menjadi pengetahuan umum bagi pengunggah akun, maka perlu materi etika bermedia sosial disisipkan dalam materi Bahasa Indonesia, baik di jenjang SD, SMP, maupun SMA. Diharapkan dengan penyisipan materi tersebut muncul SDM kualitas, khususnya SDM yang mengembangkan kesantunan dalam berkomunikasi.

---

## 1. PENDAHULUAN

Akun Jokowi menjadi perhatian peneliti karena hadirnya satu akun memicu munculnya akun-akun yang sama. Semua akun mengatasnamakan Jokowi. Ada akun yang lebih spesifik namanya, yakni Akun Resmi Jokowi. Akhirnya, peneliti memilihnya untuk sumber data penelitian.

Jarak waktu 3 tahun, yakni dari tahun 2014 hingga 2017, tidak menjadikan objek penelitian ini berkurang nilai aktualitasnya. Hal itu dikarenakan ungkapan disfemistik akan selalu muncul ketika masyarakat pengunggah akun lolos mengekspresikan ungkapan disfemistik di media sosial tanpa campur tangan redaksi. Tulisan masyarakat dibiarkan bebas tanpa editan redaksi.

Memang muncul persoalan jika ungkapan mereka diedit. Tumbuh kecurigaan dari masyarakat bahwa redaksi yang bertugas mengedit melakukan campur tangan yang mendalam. Campur tangan yang mendalam itu berupa melakukan penggantian pesan yang tidak selaras dengan garis media.

Hasil tulisan di Akun Resmi Jokowi dikembangkan dengan 2 tampilan, yakni tulisan yang murni dari pengunggah akun dan tulisan yang sudah diedit. Tulisan yang diedit redaksi diberi tambahan cacatan. Untuk sumber data penelitian ini dipilih tulisan yang belum ada campur tangan redaksi. Karena itu, data dimunculkan dengan cara *di-copy paste*.

Ada kekhawatiran dari pembuat akun tentang Jokowi sehingga mereka harus menambahkan

kata resmi di tengah akun Jokowi. Dengan penambahan kata resmi konstruksi frasa nominal yang dihasilkan menjadi Akun Resmi Jokowi

Sikap elite politik yang dengan mudah menyampaikan kekerasan verbal atau tuduhan terhadap pihak yang dianggap sebagai lawan politik berpotensi mempertebal prasangka di masyarakat secara umum [1]. Masih menurut harian tersebut, dalam jangka panjang, penebalan prasangka itu bisa menyebabkan gesekan sosial dan konflik terbuka di masyarakat.

Ekspresi yang dianalisis berupa ungkapan, baik yang bernilai rasa positif maupun negatif. Untuk artikel ini dikhususkan pada contoh-contoh sapaan yang bernilai rasa [7].

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian berupa kata sapaan. Datanya berupa kalimat yang mengandung kata sapaan. Sumber datanya adalah akun resmi Jokowi yang muncul menjelang pilihan presiden tahun 2014. Untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan pembacaan terhadap tulisan di akun tersebut. Selanjutnya, dipilih sapaan yang memiliki konotasi negatif. Sapaan yang demikian tergolong ungkapan yang disfemistik. Teknik analisis data menggunakan teknik baca markah. Selain itu, digunakan metode padan pragmatik dan metode padan referensial.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam akun Jokowi ditemukan data seperti (1) hingga (8) berikut ini. Pada ketujuh contoh ini ditemukan pemakaian kata cecunguk (1), kamu (2), Anda (3), orang y(an)g satu ini (4), presiden rakitan (5), dan Jokowi ((6), (7), dan (8)).

(1) Dulu sy mendukung bapak mati2an.. Tp smakin skrang, sy smakin keewa..! Bpak trlalu lemah trhadap partai dan **mega**.. Sy kira anda bisa menghadapinya.. Tp ternyata..!! Smoga ke depan **bapak** tdk terhasut lagi oleh bisikan2 **cecunguk** d samping bapak..! (Akang Jowel)

- (2) Saya juga bingung presiden kita terlalu banyak bicara , seharusnya banyak bekerja saya dulu memilih **kamu** tanpa ada imbalan dan tanpa ada apa apa berkampanye keseluruh indonesia biaya sendiri. (Jonathan Waeo)
- (3) Mulai Skrg Saya Sudah Gak Respect Dengan Segala Keputusan **Anda** (De Joel Laka Maning)
- (4) gak yakin dengan **org yg satu ini** banyak janji nya (Afandy Vsi)
- (5) Yg lbh penting saja tdk mampu diatasi malah kesini mngalihkn prhatian pndukungnya yg lemah n mudah dipengaruhi. **Presiden rakitan** ya gini (Ryadi Arjunaidi)
- (6) **Jokowi** mulai ngak jelas statusnya (Dian Dorego)
- (7) Mantap **jokowi** ... Baru kali ini berani bubarkan pssi (Anwar Rubangi)
- (8) sejak **jokowi** jdi prsiden .jdi bnyak. percrayan rumh tngga .pengguran .kejahatan. perampogan. perhipnotisan. gara" harga bhan poko pda mhal ... kapan indonesia akn sejahtera kaya eropa. bebas dri kmiskinan (Asep Syafira)

Bentuk cecunguk (1) mengacu pada orang-orang dekat Joko Widodo. Karena “ditanamkan bahwa di luar kandidat yang menjadi pilihan mereka adalah pihak yang harus dimusuhi yang tidak diinginkan berhasil mendapatkan simpatik dari orang lain, maka orang-orang dekat itupun diperlakukan secara tidak hormat, seperti kandidat presiden di luar kandidat yang menjadi pilihan mereka. Kata cecunguk merupakan bahasa Sunda yang memiliki sinonim dengan kata kecoa atau coro. Dengan penyebutan hewan atau binatang untuk mengacu pada orang berarti penggunaan disfemistik itu untuk maksud merendahkan.

Secara psikologis ungkapan disfemistik muncul, seperti memilih sapaan demikian, saat seseorang dalam kondisi tidak stabil. Pada saat itu emosi yang berkembang adalah emosi negatif. Massa demikian tidak ingin kandidat lain dan elite pendukungnya mendapatkan simpatik dari orang lain. Jalan yang ditempuh ialah dengan melemahkan pengaruhnya. Dengan cara itu dukungan terhadap kandidat lain mengendur.

Ada pertanyaan penting yang perlu dikaji, yakni mengapa pihak humas untuk masing-masing kandidat melakukan pembiaran seperti itu. Sudah adakah program untuk masing-masing partai untuk melakukan pembinaan kepada massa pendukungnya agar kohesi sosial tetap terjaga? Masyarakat Indonesia menengarai Masyarakat sudah memberikan nilai bahwa elite yang akan memperebutkan kursi kekuasaan tidak berusaha mendekati massa pendukungnya dengan pemberian nilai kebangsaan. Dengan adanya pembiaran ini kandidat hanya membutuhkan mereka menjelang pengerahan massa hingga pencoblosan. Bila tidak dibekali, jika terjadi kekalahan misalnya, mereka menjadi tidak legawa. Melalui pemakaian kata disfemistik mereka menebarkan ketidaknyamanan bagi orang lain. Melalui pemanfaatan teknologi informatika penggunaan kosakata disfemistik mudah berkembang sehingga kosakata demikian dikenal pula oleh kelompok lain. Jika kelompok lain tersebut mengembangkan kosakata demikian, berarti mereka juga menyimpan benih-benih permusuhan. Kosakata disfemistik yang berbentuk sapaan “disuburkan” di “ladang” mereka sendiri, yakni media atau tempat mereka menyalurkan aspirasi partai.

Bentuk kamu (2) dan Anda (3) lebih nilai netral. Keduanya dipakai dalam komunikasi yang antar partisipannya tidak memiliki kedekatan. Etika di Indonesia mengajarkan bahwa presiden adalah simbol negara yang harus dihormati. Dalam konteks ini diusulkan bahwa calon presiden yang mendapatkan legitimasi masyarakat, apalagi terbukti sudah menunjukkan kerja prestatif layak untuk dihormati.

Jika ditelusuri, ketidaktepatan penggunaan pronomina orang kedua, khususnya Anda, ditemukan di banyak kasus. Selain pada komunikasi keseharian yang dialami mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia sendiri, khususnya di FKIP-UMS, dengan dosen mereka dalam komunikasi melalui handphone, ditemukan pula pada mahasiswa asing yang sedang belajar Bahasa Indonesia (Rahmawati, 2017). Dengan beragam kasus tersebut, amat layak pronomina tersebut

ditekankan dalam pembelajaran. Contoh hipotetis demikian “Kapan Anda ke kampus?”, “Saya mau minta tanda tangan Anda (!)”, dan “Saya sudah menunggu Anda di kampus”.

Frase nominal orang y(an)g satu ini (4) menunjukkan bahwa karakternya berbeda dengan kebanyakan. Karakter yang dimiliki, menurut pengunglah akun, adalah karakter buruk.

Sapaan presiden rakitan muncul dilatarbelakangi proses penunjukan, yakni pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri, yang merekomendasikan Joko Widodo sebagai calon presiden dari partai itu. Oleh karena itu, pengunglah memberi sebutan presiden rakitan..

Sebutan Jokowi ((6), (7), dan (8)) dikenal dalam masyarakat Jawa sebagai sebutan jangkar, yakni menyebut orang yang usianya lebih tua dengan tanpa sapaan. Sebutan seperti itu umumnya dimunculkan jika penutur seusia mitra tutur (: setara). Dalam berkomunikasi sebutan ini kemudian dibarengi dengan pilihan kata ngoko atau jangkar.

Penyebutan nama terhadap pemimpin tanpa disertai sapaan Pak atau Bapak lazim dikembangkan dalam ragam jurnalistik, khususnya dalam berita. Misalnya ialah contoh (a) dan (b).

- (1) ”Jokowi Didesak Bicara Soal Dukungan”
- (2) “Jokowi Bicara Soal Capres”

Menjadi hal yang sangat urgen untuk menjadikan etika bermedia sebagai suplemen mata pelajaran bahasa Indonesia, baik di SD, SMP, maupun SMA. Selain Bahasa Indonesia, materi tersebut dapat disisipkan dalam matakuliah Pancasila di Perguruan Tinggi.

Internet sudah bisa dioperasikan anak SD. Oleh karena itu, akun-akun yang muncul amat memungkinkan mereka tertarik. Sebelum menulis, mungkin mereka akan membaca tulisan-tulisan sebelumnya. Jika tulisan tersebut bahasanya tidak standard dan melanggar etika sosial, mereka akan terpengaruh meniru penggunaan bahasa mereka. Mereka merasa tidak memiliki beban karena yang lainnya juga menggunakan bahasa tersebut. Kecuali itu, di

sekolah tidak pernah mendapatkan materi tentang pentingnya beretika dalam berkomunikasi di internet dari guru yang mengajar. Atau, jika mendapatkan, maka mereka beranggapan bahwa aturan itu hanya berlaku dalam komunikasi biasa, bukan komunikasi di media massa. Komunikasi biasa yang dimaksud adalah komunikasi yang terjalin di lingkungan keluarga dan di sekolah. Misalnya hanya diterapkan pada orang tua dan guru-guru mereka di sekolah.

Menjadi amat terlambat bila mengajarkan etika bermedia menunggu materi itu dimasukkan di buku teks. Guru yang profesional dituntut untuk memanfaatkan potensi sekitar untuk bahan pengayaan pembelajaran di kelas, termasuk kasus aktual yang terjadi di lingkungan siswa, apalagi kasus tersebut sudah menasional yang jika dibiarkan akan menurunkan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Jika demikian, ada tuntutan bagi guru untuk mengembangkan kepekaan diri untuk bekal pembelajaran siswa. Mereka harus dinamis agar sesuatu yang terjadi di lingkungan mereka segera dapat ditangkat sehingga dengan cepat memberikan sumbangan nilai untuk penguatan anak didik mereka. Hal semacam itu sudah lama muncul dalam dunia pendidikan, khususnya dalam teknik pembelajaran, yakni pembelajaran berbasis kasus.

Contoh (11) dan (12) berbeda dengan contoh ((6) – (8)). Contoh (11) dan (12) menambahkan sapaan Bpk (: Bapak). Bila demikian, penulis akun tidak melanggar prinsip kebijaksanaan, khususnya kesantunan. Secara kuantitas, penambahan sapaan hormat ini dominan muncul dalam akun tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat, khususnya penulis di akun Jokowi, sudah bisa mempraktikkan diri bagaimana cara memberikan kritik kepada pemimpin mereka, termasuk kepada presiden.

- (1) Smoga Bpk Presiden ttp Istiqomah dlm memimpin negeri ini, Amiin. (Hamman dan Abi)
- (2) Semoga bpk selalu dberi kemudahan dan kesehatann....aminn ya allohh (Didit Puja Aryanto)

Sikap positif warga masyarakat dalam beragam bidang, termasuk menyikapi pesta demokrasi, khususnya pemilihan presiden, dapat tumbuh manakala mereka menjadi insan yang berkarakter, yakni masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Wujud toleransi mereka adalah menghormati kandidat presiden yang bukan dari pilihan mereka.

Untuk bisa berlaku hormat mereka perlu mendapatkan pengetahuan tentang nilai itu melalui ceramah, baik di dalam organisasi partai yang mereka masuki maupun dari pengajian atau ceramah/khotbah di tempat ibadah (masjid, gereja, kelenteng, atau lainnya).

Dengan analisis psikologis diketahui bahwa apa yang diucapkan atau yang ditulis mewakili kejiwaan si penulis tersebut. Penulis yang menyukai sesuatu akan memuji sesuatu tersebut, sebaliknya penulis yang tidak menyukai sesuatu akan mencela atau mengkritiknya.

Kritikan dari masyarakat dibutuhkan bagi kandidat untuk bahan pembenahan ke depan. Hal itu penting bagi kedua atau ketiga kandidat yang akan berkompetisi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan masing-masing.

Hal yang perlu bagi kandidat yang membuka akun untuk komunikasi dengan massa pendukungnya adalah memberi wawasan tentang etika berkomunikasi melalui media agar mereka mampu memberi saran atau mengkritik dengan cara yang terhormat dengan tidak mengurangi substansi isi saran atau kritikan. Mereka yang melakukan hal itu adalah kandidat yang siap kalah.

Siapa pun yang mengandalkan kekuatan massa, mereka perlu memberi "isi", yakni pengetahuan yang aplikatif tentang etika berkomunikasi agar mereka mampu santun pada siapa pun, termasuk kandidat presiden yang bukan menjadi pilihan mereka.

Mereka yang tidak mempersiapkan massa berarti melakukan pembiaran jika massa mereka melakukan kekerasan. Hubungan antara kandidat dengan massa pendukungnya semacam hubungan orang tua – anak. Orang tua yang menginginkan anaknya santun, mereka wajib memberi bekal

nilai kesantunan dengan pemberian contoh atau keteladanan.

Memilih sapaan yang disfemistik melanggar prinsip kesopanan. Munculnya kasus ini memperlihatkan bahwa etika bermedia belum menjadi pengetahuan mereka, apalagi untuk dipraktikkan. Bersikap legawa terhadap kehadiran kandidat lain mereka anggap sebagai ancaman terhadap kandidat yang mereka usung. Begitu pula untuk bersikap toleran terhadap hadirnya kandidat lain, mereka tidak mengembangkan sifat tersebut. Digunakan jarak kedekatan, seperti pemakaian pronomina calon kami dan calon mereka. Penyebutan seperti itu memperlihatkan masyarakat sudah terbelah. Karena muncul kekhawatiran akan terjadi perpecahan setiap ada pesta demokrasi, ada anggota masyarakat yang pesimis dengan penyelenggaraan pemilihan yang setiap lima tahun diselenggarakan.

Memilih sapaan yang disfemistik juga menyulut api kemarahan orang lain. Akibatnya, muncullah benih-benih disintegrasi. Jika setiap memilih pemimpin selalu ditandai kekerasan verbal semacam itu, kondisi masyarakat menjadi lemah karena setiap ada pemilihan ada kegoyahan.

Merupakan prestasi elite politik pada suatu partai bilamana mereka mampu melakukan pendidikan politik untuk mengawal massa pada awal kegiatan mereka. Diusulkan kepada panitia Pemilihan Umum untuk memberikan *reward* kepada partai yang mampu mengatur massa pendukungnya. Untuk bisa berbuat netral, dipilih tim penilai yang nonpartai untuk memberi penilaian tentang kualitas partai yang dinilai dari kedewasaan massa pendukungnya.

Menjadi hal menarik untuk melacak pihak yang memperkenalkan sapaan disfemistik kepada massa pendukungnya. Melalui peran elite partai sapaan itu mudah menyebar yang segera masuk di telinga pendukungnya. Sapaan itulah yang jika sampai ke kelompok *grassroots* akan memicu munculnya kekerasan di kalangan itu jika bersinggungan dengan pendukung lainnya. Jika elite di partai lain tidak peka terhadap perilaku pendukungnya di tingkat bawah, pendukung mereka pun akan mengimbangi perilaku massa

lain untuk melakukan kekerasan. Bila demikian, pemerintah amat perlu melakukan pelatihan kepada calon elite di masing-masing partai mengenai karakter kenegarawanan, patriotisme, dan tokoh berdedikasi agar elite tersebut tidak bercacat ketika masa-masa "genting" tiba. Yang dimaksud masa-masa "genting" adalah masa-masa berkampanye yang di dalamnya kandidat yang tidak berkepribadian cenderung menggunakan kampanye hitam (*black campaign*) untuk mencari calon pendukung. Kampanye hitam adalah kampanye yang dilakukan oleh suatu pihak untuk menyerang lawannya dengan meniup isu bohong. Informasi yang sengaja diedarkan lebih banyak bohongnya daripada benarnya [8].

Diharapkan elite politik sadar diri untuk mendahulukan kohesi sosial bangsa. Anak muda, seperti pernyataan inayah Wahid, pendiri *Positive Movement* [1] wajib kritis terhadap informasi apa pun yang didapat. Jika itu sudah dipegang, akan lebih mudah mengetahui pernyataan apa yang harus didengar dan mana yang "sampah" dan perlu dibuang. Selanjutnya, masih pada koran yang sama, Indro Adinugroho menunjukkan ada dua dampak yang bisa muncul dari pernyataan elite politik yang berisi tuduhan tanpa basis yang kuat, yakni (1) bisa muncul ketidakpercayaan terhadap elite dan (2) masyarakat yang percera terhadap elite akan menerima informasi itu begitu saja sehingga bisa menimbulkan konflik sosial. Dijelaskan mereka berpikiran demikian karena masyarakat Indonesia memiliki keterbatasan pendidikan. Mereka berpola otomatis, bukan deliberatif. Mereka meniru elite. Kalau yang dipelajari baik, hasilnya juga baik. Akan tetapi, jika yang dipelajari buruk, maka hasilnya juga buruk. Oleh Azyumardi Azra diingatkan bahwa sikap elite yang mengeluarkan pernyataan tanpa bukti bisa memperkuat kebencian dan prasangka di masyarakat. Mochtar Pabotinggi, Guru Besar (Emeritus) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mendorong pihak yang dirugikan menggunakan jalur hukum guna memberikan efek jera. Disampaikan oleh Kepala Kepolisian Negara RI, Jenderal (Pol) Tito Karnavian memastikan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di

media sosial merupakan langkah pamungkas untuk mencegah konflik di masyarakat. Lebih lanjut dikatakan perlu ada upaya seluruh komponen dalam program pencegahan, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga pemerintah untuk mewujudkan sitausi dunia maya yang kondusif [2]. Jika demikian, orang tua, guru, pemuka masyarakat, dan elite organisasi perlu melakukan tindakan proaktif untuk mengatasi munculnya kebencian di media itu. Tentang langkah konkretnya, akan dilakukan penelitian lanjutan. Pencegahan perilaku patologis ini memerlukan keterampilan khusus, yakni orang tua, guru, pemuka, dan elite organisasi harus “melek” media agar bisa mengidentifikasi perilaku anak/remaja atau massa di media tersebut. Persyaratan itu harus mereka miliki karena ungkapan kebencian sudah pada tarap yang amat mengkhawatirkan, yakni menjadi ladang industri. Hal ini terungkap pada judul berita berikut “Produsen Konten Hoaks Terungkap” [3], “Kebohongan Jadi Industri” [4], “Hoaks Menjadi ladang Bisnis” [5], dan “Produsen Hoaks Incar Peristiwa Politik” [6].

#### 4. KESIMPULAN

Ungkapan disfermistik yang dipilih dengan kata sapaan sengaja dipilih untuk mendeskreditkan rival politik. Kata sapaan paling mudah dipilih untuk membunuh karakter lawan politik agar masyarakat ragu memilihnya lalu tidak menyalurkan aspirasi politiknya ke kandidat demikian. Memunculkan sapaan demikian merupakan senjata bagi rival untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat. Sapaan-sapaan demikian merupakan contoh kampanye hitam (*black campaign*), bukan kampanye negatif. Kampanye negatif diperbolehkan dalam berkampanye karena di dalamnya diungkap

mengenai kekurangan program yang ditawarkan kandidat lain, sementara kampanye hitam didasarkan rasa ketidaksukaan dari rival politik.

Bagi masyarakat, mereka amat perlu belajar memilih dan memilah informasi di media massa, termasuk yang muncul di media sosial. Mereka perlu mendapatkan informasi yang objektif agar ketika menjatuhkan pilihan ke seorang kandidat didasarkan sejumlah kriteria unggul yang dimiliki kandidat yang mereka pilih. Bila demikian, masyarakat perlu dipersiapkan untuk secara terbuka mempelajari kandidat lain agar bisa menilainya secara netral. Siapa yang memberi arahan ini? Kaum akademisi yang pemikiran kritis mereka disumbangkan untuk kepentingan bangsa dan negara.

#### REFERENSI

- [1] Kompas.Kekerasan Verba; Bisa Picu Konflik Sosial.2017.
- [2] Kompas.Hadirkan Iklim Positif di Internet.2017.
- [3] Kompas.Produsen Konten Hoaks Terungkap.2017.
- [4] Kompas.Kebohongan Jadi Industri.2017.
- [5] Kompas.Hoaks Menjadi Ladang Bisnis.2017.
- [6] Kompas.Produsen Hoaks Incar Peristiwa Politik.2017.
- [7] Sabardila, Atiqa, Joko Santoso, Agus Budi Wahyudi, Dwi Haryanti, Sugeng Riyanto, Naimul Faizah.*Ekspresi Netizen pada Akun Resmi Jokowi*.ICDETAH .Malaysia: Universitas Sultan Idris: 2016.
- [8] Setiawan, Hendi.*Black Campaign vs Negative Campaign*.Kompasiana; 2014.
- [9] Sudaryanto.*Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press; 1993.